

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dapat dikatakan berkembang atau tidak dapat dilihat dari perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Hubungan antara perkembangan ekonomi dengan pendapatan negara adalah suatu proses pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan negara. Jadi semakin tinggi perkembangan ekonomi maka semakin tinggi pula pendapatan suatu negara. Pendapatan negara di Indonesia sendiri terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari kementerian keuangan total pendapatan negara pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.165.1 triliun (Kementerian ESDM, 2023). Salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan negara itu sendiri yakni dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2019 telah mencapai 82,5% dari total pendapatan negara. Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi mengatur dan mendukung kebijakan pemerintah.

Dalam perspektif teori keagenan, manajer sebagai agen memiliki dorongan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, sementara pemegang saham sebagai prinsipal menginginkan peningkatan nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Ketidakselarasan kepentingan ini seringkali melahirkan praktik manajemen laba,

yaitu upaya manajer untuk mengatur laporan keuangan demi mencapai tujuan tertentu.

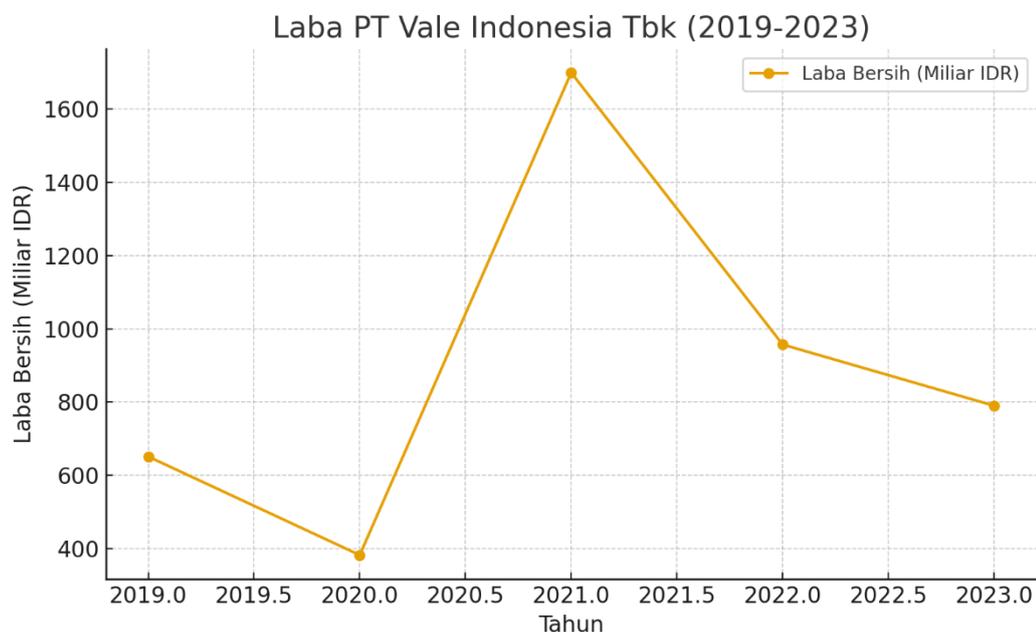
Insentif pajak diberikan pemerintah sebagai bentuk keringanan beban perusahaan, misalnya melalui penurunan tarif PPh Badan atau relaksasi pajak saat pandemi COVID-19 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Keringanan ini diharapkan mendorong keberlangsungan operasional perusahaan, termasuk sektor pertambangan yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional.

Di sisi lain, insentif non pajak juga berperan dalam membentuk perilaku manajemen. Insentif ini meliputi leverage, kepemilikan manajerial, profitabilitas, hingga intensitas modal yang dapat memengaruhi keputusan strategis perusahaan (Fitri, 2021). Faktor non fiskal ini juga sering dijadikan ukuran daya saing dan keberlanjutan perusahaan tambang. Fenomena yang menarik dapat dilihat pada PT Vale Indonesia Tbk, salah satu perusahaan tambang besar yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*. Data simulasi pada periode 2019–2023 menunjukkan adanya dinamika signifikan pada variabel insentif pajak, insentif non pajak, serta manajemen laba.

Dalam konteks perusahaan sektor pertambangan, manajemen laba semakin menarik untuk dikaji mengingat sektor ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, perubahan regulasi pemerintah, serta berbagai insentif fiskal dan non-fiskal yang ditawarkan (Hanifah, M & Arfan, M., t.t.). Selain itu, perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) memiliki karakteristik syariah yang menuntut transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan (IAI, 2020).

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pertambangan. Insentif pajak yang diberikan antara lain berupa *tax holiday*, *super deduction tax*, dan pengurangan tarif pajak penghasilan (Direktorat Jendral Pajak, 2022). Di sisi lain, insentif non pajak seperti kemudahan perizinan, subsidi energi, dan penyediaan infrastruktur juga ditawarkan untuk meningkatkan daya saing industri (BKPM, 2021).

Meskipun bertujuan positif, insentif ini dapat mendorong manajemen perusahaan untuk mengelola laba agar tampak memenuhi persyaratan insentif atau menunjukkan kinerja keuangan yang stabil. Hal ini tentu dapat mengaburkan kualitas informasi keuangan dan berpotensi menyesatkan para pemangku kepentingan. Dalam laporan OJK (2023), disebutkan bahwa sektor pertambangan mengalami pertumbuhan laba bersih sebesar 12,5% pada tahun 2021, namun kembali mengalami penurunan hingga 8,3% pada tahun 2023 (OJK, 2023). Fluktuasi ini menunjukkan ketidakstabilan kinerja yang dapat menyebabkan spekulasi adanya praktik manajemen laba, apalagi ketika disandingkan dengan data bahwa beberapa perusahaan berhasil memanfaatkan insentif fiskal dengan sangat optimal. Berikut merupakan grafik laba pada perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. (INCO). Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1. 1
Laba PT Vale Indonesia Tbk

Sumber: IDX.co.id, data diolah oleh peneliti (2025)

Dalam konteks perusahaan sektor pertambangan, fenomena manajemen laba semakin relevan untuk dikaji. PT Vale Indonesia Tbk (INCO), sebagai salah satu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII), menunjukkan fluktuasi signifikan pada kinerja keuangan periode 2019–2023. Pada tahun 2020, laba bersih perusahaan turun drastis akibat pandemi, namun kembali melonjak tajam lebih dari 300% pada tahun 2021, seiring meningkatnya harga nikel global. Meskipun laba melonjak, beban pajak efektif justru mengalami penurunan rasio yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik perencanaan pajak agresif. Di sisi lain, indikator insentif non pajak seperti leverage dan capital intensity cenderung menurun, namun praktik manajemen laba justru meningkat dari 28% di tahun 2019 menjadi 44% pada 2023. Pola ini

mengindikasikan adanya potensi praktik manajemen laba yang dilakukan untuk menjaga kinerja keuangan tetap terlihat stabil di mata investor dan regulator, meskipun kondisi fundamental perusahaan tidak selalu mendukung. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana insentif pajak dan non pajak dapat menjadi faktor pendorong praktik manajemen laba dalam perusahaan syariah sektor pertambangan.

Terdapat pandangan yang berbeda terhadap manajemen laba, dan hal ini menimbulkan dilema etis. Pada satu sisi, manajemen dipandang sebagai tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, karena dapat menyajikan informasi yang menyesatkan dan tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat merugikan investor dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, kegiatan ini dianggap wajar dan sebagai sebuah tindakan rasional dalam memanfaatkan fleksibilitas pelaporan keuangan. Penelitian ini berpijak pada Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) mendorong manajer untuk bertindak demi kepentingan pribadi, salah satunya melalui manajemen laba. Dalam konteks ini, insentif pajak dan non pajak yang diberikan pemerintah dapat menjadi pendorong manajer untuk memanipulasi laporan laba guna memenuhi harapan atau target tertentu terutama pada pelaporan keuangan (Kamil, 2018).

Praktik manajemen laba merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memengaruhi laporan keuangan, baik dengan tujuan internal seperti mencapai target laba, maupun eksternal seperti mempengaruhi persepsi investor dan pemangku kepentingan. Menurut Healy dan Wahlen (1999), manajemen laba adalah upaya manajemen menggunakan pertimbangan dalam

pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dengan maksud menyesatkan stakeholder atau memengaruhi kontrak yang bergantung pada angka akuntansi (Healy, James, 1999). Dalam praktiknya, tindakan ini sering dilakukan dalam rangka memenuhi ekspektasi pasar, mempertahankan citra perusahaan, atau menghindari pelanggaran perjanjian utang.

Manajemen laba yang terjadi di Indonesia yang terjadi pada perusahaan, bahkan banyak sekali ditemukan terjadinya manajemen laba. Ukuran perusahaan dapat dijadikan klasifikasikan kedalam bentuk, perusahaan yang berukuran besar dan perusahaan berukuran kecil. Ukuran perusahaan disini sangat mempengaruhi terjadinya manajemen laba karena semakin besar suatu perusahaan harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Perusahaan cenderung akan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Tambahan dana tersebut bisa didapatkan dari penerbitan saham baru atau penambahan hutang (Astuti, 2017).

Keberadaan insentif pajak menjadi sebuah peluang, semakin menaikkan motivasi manajemen agar dapat melakukan manajemen laba pada perusahaan. Perusahaan yang mampu melaksanakan perencanaan pajak secara efektif dapat menggunakan celah-celah pada aturan perpajakan, sehingga beban pajak yang wajib dibayarkan dapat diminimalisasikan. Insentif pajak adalah sesuatu pancingan yang dibagikan dengan tujuan meningkatkan kinerja dari ketentuan yang sudah diresmikan. Insentif pajak timbul jika perusahaan menyangkal membayar pajak sebagai komponen biaya yang dapat mengecilkkan laba perusahaan, maka

perusahaan akan terdesak hendak melaksanakan kecurangan pada laporan keuangan supaya pajak yang dibayarkan dapat dikecilkan. Oleh karena itu, pemerintah mengamati lebih terhadap sektor pajak apalagi penerimaan negara dari sektor pajak salah satu kunci indikator keberhasilan pemerintah. Di beberapa negara, salah satunya Indonesia memiliki cara dengan usaha membagikan insentif pajak yang berbentuk suatu acuan yang ditawarkan kepada pihak wajib pajak. Insentif perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membayar kewajiban perpajakan pada pemerintah, meningkatkan investasi pada perusahaan dan mengurangi beban pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan dengan insentif pajak yang dibagi kepada sektor transportasi dan logistik yang nantinya diharapkan dapat membayar kewajiban pajak dengan tepat waktu dan sesuai (Fitri, 2021).

Insentif non pajak merupakan insentif yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan prestasi yang akan mendapatkan bonus, karyawan yang produktif dalam pekerjaan membuat kinerja perusahaan semakin membaik. Manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen akan berbeda karena insentif non-pajak pada setiap perusahaan tidak sama, terlebih antar perusahaan yang menerima laba cukup tinggi dan laba yang tidak tinggi. Begitupun dengan perusahaan yang menerima laba dengan perusahaan yang alami kerugian maka manajemen yang akan menentukan kebijakannya (Fitri, 2021).

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab pada komponen akrual dapat dilakukan permainan angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai

dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan (Sulistyanto, 2008).

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak meneliti pengaruh insentif pajak terhadap manajemen laba, seperti studi oleh Widyawati dan Puspita (2022) yang menyoroti peran tax planning terhadap praktik earnings management di sektor manufaktur (Widyawati, A, 2022). Namun, belum banyak penelitian yang secara simultan mengkaji pengaruh insentif pajak dan non-pajak terhadap manajemen laba dalam konteks perusahaan syariah, seperti yang terdaftar di JII. Perusahaan JII memiliki karakteristik unik karena tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang semestinya membatasi praktik manipulatif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan literatur dengan mengeksplorasi pengaruh antara insentif pajak dan non-pajak terhadap manajemen laba pada sektor pertambangan syariah.

Penelitian ini juga penting karena menggabungkan dua pendekatan insentif (pajak dan non pajak) dalam suatu kerangka analisis yang belum banyak dilakukan dalam literatur sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada pengaruh insentif pajak terhadap manajemen laba tanpa mempertimbangkan peran insentif non pajak secara simultan.

Sejumlah model telah dikembangkan untuk mengukur praktik manajemen laba, salah satunya adalah *Modified Jones Model* (MJM) yang dikembangkan oleh

Dechow et al. (1995) dan penelitian ini dilakukan oleh Abdurrahim (2015), yang telah digunakan dalam banyak penelitian sebelumnya (Safiq et al., 2018).

Pada penelitian ini akan menggunakan *Revenue Discretionary Model* yang dikembangkan oleh Stubben (2010) sebagai metode utama dalam mengukur manajemen laba melalui *discretionary revenues*, karena dianggap lebih sesuai dalam menganalisis pengaruh insentif terhadap pelaporan laba perusahaan. Model ini memungkinkan pengukuran lebih akurat terhadap pengaruh kebijakan fiskal terhadap strategi pelaporan keuangan perusahaan (B. Di. P. Ayu, 2019).

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan etis, serta mendorong penerapan akuntansi yang berintegritas sesuai prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi penting bagi auditor, regulator, dan akademisi dalam memahami dinamika manajemen laba Perusahaan syariah khususnya di sektor pertambangan (Harahap, S S., 2021).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut, maka penulis akan membuat karya ilmiah berbentuk skripsi dengan membahas judul **“Pengaruh Insentif Pajak dan Non Pajak Terhadap Manajemen Laba Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* Periode 2019-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh insentif non pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh insentif pajak dan non pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh insentif non pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh insentif pajak dan non pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan karya ilmiah yang dapat bermanfaat untuk berbagai kalangan, baik untuk kepentingan pengembangan program akademis maupun untuk praktisi.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi manajemen dan perpajakan, dengan menambah wawasan terkait pengaruh insentif pajak dan non-pajak terhadap praktik manajemen laba.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian secara praktis bagi para praktisi pebisnis yang sedang mempelajari ilmu terkait dengan ilmu manajemen laba dapat menggunakan penelitian ini untuk memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang manajemen laba dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menerapkannya pada saat mengambil keputusan.

3. Manfaat Bagi Pemangku Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pemangku kebijakan, karena dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh insentif pajak dan insentif non pajak terhadap manajemen laba agar para pemangku kebijakan dapat lebih cermat dalam menilai kinerja keuangan dan bagi manajemen diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta menghindari praktik manajemen laba yang dapat merugikan banyak pihak.